BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap total PDB Indonesia serta mampu mengambil bagian besar sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu juga memiliki peran penting di dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang. Berdasarkan Kadin Indonesia, UMKM memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat jumlahnya yang mencakup 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp 9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat tahun 2016, Kota Bukittinggi memiliki 19.032 usaha skala mikro, 3.762 usaha skala kecil, 616 usaha skala menengah dan 13 usaha skala besar. Dengan posisi strategis sebagai destinasi wisata, Bukittinggi memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor UMKM dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, kerajinan, dan kuliner. Keberadaan

UMKM ini tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian lokal, tetapi juga terhadap penerimaan pajak negara.

Salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan peran UMKM di Wilayah Kerja KPP Pratama Bukittinggi, salah satunya yaitu Kota Bukittinggi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Mematuhi kewajiban pajak merupakan tindakan yang perlu dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kewajiban wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material mengacu pada pemenuhan isi dan semangat yang terkandung dalam undang-undang perpajakan yang wajib dipatuhi oleh setiap wajib pajak (Farida & Irawati, 2023).

Kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan sejauh mana pelaku UMKM menjalankan kewajiban perpajakan mereka selaras dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan. Kepatuhan pajak meliputi beragam aspek, mulai dari proses registrasi wajib pajak, pelaporan SPT tahunan, hingga pembayaran pajak yang tepat waktu. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penerimaan pajak serta stabilitas keuangan negara (Wardani et al., 2024).

Pajak adalah satu di antara instrumen krusial untuk pemerintah saat melaksanakan berbagai program pembangunan. Berdasarkan UU nomor 28 tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1980 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM sering kali disebabkan oleh berbagai faktor. Persepsi terhadap tarif pajak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Pandangan UMKM masih cenderung negatif terkait dengan penurunan tarif pajak, sehingga belum berpengaruh pada niat UMKM untuk mematuhi peraturan, malah cenderung mereka untuk berperilaku tidak patuh. Peningkatan total UMKM di Indonesia masih belum sejalan dengan terjadinya peningkatan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Meskipun tarif pajak telah diturunkan, hal ini masih belum berhasil mendorong UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. (Meliandari & Utomo, 2022).

Anggiani & Susilawati (2024) mendefinisikan persepsi tarif pajak merupakan pandangan dan penilaian subjektif dari wajib pajak UMKM terkait besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan berdasarkan pendapatan usaha mereka. Jika pelaku UMKM merasa bahwa tarif pajak yang diberlakukan dianggap terlalu tinggi atau tidak selaras dengan kondisi usaha mereka, maka mereka mungkin merasa terbebani dan cenderung untuk menghindari atau menunda pembayaran pajak. Sebaliknya, jika mereka menilai tarif pajak yang diterapkan sudah adil dan

proporsional, maka kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan cenderung akan lebih tinggi.

Moniarta (2020) dalam (Meliandari & Utomo, 2022) berpendapat bahwa persepsi yang positif mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, sementara persepsi yang negatif dapat menyebabkan individu berperilaku menolak atau bersikap anti terhadap sesuatu. Sebagian besar pelaku UMKM berpendapat bahwa tarif pajak yang dikenakan tidak sebanding dengan pendapatan atau omzet yang mereka peroleh, terutama dalam kondisi usaha yang fluktuatif. Dalam hal ini, ketidakpastian pendapatan yang sering dialami oleh pelaku UMKM membuat mereka merasa ragu untuk membayar pajak secara konsisten, karena mereka khawatir bahwa pajak yang harus dibayarkan akan menggerus keuntungan yang sudah tipis.

Di sisi lain, berdasarkan Kementerian Keuangan RI Ditjen Pembendaharaan tahun 2022, kebijakan pemerintah yang memberikan tarif pajak yang lebih rendah bagi UMKM sebenarnya bertujuan untuk mengurangi beban pelaku UMKM serta mendorong kepatuhan pajak. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pelaku UMKM dengan pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar setiap tahunnya hanya diterapkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dari total pendapatan. Kebijakan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan para pelaku UMKM, karena beban pajak yang dikenakan dianggap lebih ringan dibandingkan dengan pengusaha berskala besar. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, masih banyak pelaku UMKM yang berpendapat bahwa besaran tarif pajak tersebut masih dianggap terlalu tinggi atau

tidak sesuai dengan kondisi usaha mereka, sehingga tingkat kepatuhan pajak tetap rendah.

Hal ini dijelaskan dalam jurnal tentang pengurangan besaran tarif pajak PPh Final 0,5% untuk para pelaku UMKM, bahwa penurunan tarif tersebut ternyata masih sulit dirasakan oleh pelaku UMKM, karena mereka belum mampu menyusun pembukuan keuangan yang baik dan benar. Akibatnya, manfaat dari kebijakan penurunan tarif ini belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku UMKM. Tetapi, dalam Direktorat Jenderal Pajak juga dijelaskan bahwa pemerintah memandang kebijakan penurunan tarif pajak PPh Final tersebut dapat membuat para wajib pajak agar lebih terdorong untuk jujur melaporkan omzet usaha mereka. Kebijakan ini juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM yang belum terdaftar untuk mulai berkontribusi dengan melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak, memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif yang baru.

Selain persepsi tarif pajak, faktor tambahan yang juga memengaruhi kepatuhan terhadap pajak adalah penerapan sanksi pajak. Arifin (2024) menyatakan jika sanksi pajak juga terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Agar masyarakat patuh terhadap peraturan perpajakan, perlu penerapan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan perpajakan sebagai upaya untuk menegakkan kepatuhan dan disiplin dalam menjalankan kewajiban pajak (Farida & Irawati, 2023). Sanksi pajak adalah bentuk hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mardiasmo (2011) dalam Solihah et al.

(2021) berpendapat bahwa sanksi ini bisa berupa denda administratif, bunga, atau bahkan pidana bagi pelanggaran perpajakan yang lebih serius.

Dalam pasal 13 ayat (5) menyatakan bahwa “Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam pernyataan ini, sanksi pajak bertujuan untuk menimbulkan efek pembelajaran bagi wajib pajak sehingga mereka menjadi lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sebagian besar pelaku UMKM beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan belum memberikan manfaat yang secara langsung dirasakan dalam perkembangan usaha mereka, sehingga mereka enggan untuk melakukan registrasi diri sebagai wajib pajak dan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Namun, dengan adanya sanksi berat dan kesulitan dalam mengakses pinjaman bank, pelaku UMKM diharapkan semakin sadar dan taat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta melakukan pembayaran pajak (Wahyudi, 2020).

Selain itu, ketakutan akan dikenai sanksi yang berat sering kali membuat pelaku UMKM enggan untuk mendaftar sebagai wajib pajak atau melaporkan pendapatan mereka secara jujur, karena mereka khawatir akan dikenai denda yang besar. Seperti yang dinyatakan oleh Wahyudi (2020) bahwa kendala yang dihadapi

oleh pelaku UMKM dalam mendaftar untuk menjadi wajib pajak yaitu adanya *stereotype* yang tertanam bahwa adanya diskriminasi sanksi perpajakan, wajib pajak khususnya pelaku UMKM merasa dibeda-bedakan berkaitan pemberian sanksi.

Faktor lain yang juga memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Berdasarkan Wibowati (2021), kualitas adalah ukuran standar yang diinginkan oleh konsumen, jika suatu perusahaan dikatakan sudah berkualitas berarti sudah memenuhi standar keinginan konsumen bahkan melebihi harapan dari konsumen. Wibowati (2021) juga menjelaskan bahwa pelayanan adalah setiap aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak lain. Berdasarkan Apriliana & Sukaris (2022), pada dasarnya pelayanan merupakan sekumpulan aktivitas yang terjadi dalam suatu proses. Sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, pelayanan mencakup seluruh aspek kehidupan individu dalam masyarakat, di mana pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui aktivitas individu lain.

Farida & Irawati (2023) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merujuk pada cara memberikan bantuan, mengelola, dan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak. Berdasarkan Pranadata (2014) sebagaimana dikutip dalam penelitian Isra (2023), kualitas pelayanan pajak merupakan faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk lebih tertarik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diharapkan petugas pelayanan pajak memiliki kompetensi yang memadai terkait segala aspek perpajakan di Indonesia. Kualitas pelayanan mencakup berbagai aspek, mulai dari

kemudahan akses informasi, kejelasan prosedur perpajakan, hingga sikap yang ditunjukkan oleh petugas pajak ketika memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat memberikan kenyamanan serta membangun kepercayaan wajib pajak ketika melaksanakan tanggung jawab perpajakannya agar mereka lebih termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak.

Di era digital saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan pelaporan pajak bagi masyarakat. Salah satu terobosan tersebut adalah melalui penerapan sistem *Electronic Filing* atau *e-Filing* Pajak yang memungkinkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online*. Inovasi ini hadir seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin marak digunakan di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya *e-Filing*, wajib pajak kini sudah tidak perlu lagi mengantre di Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan pajak mereka. Masyarakat hanya datang ke kantor pajak sekali saja untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Setelah mendapatkan EFIN, wajib pajak bisa melakukan proses pelaporan pajak secara mandiri dan *online* kapanpun dan di manapun, menjadikan proses pelaporan lebih cepat, efisien, dan praktis (Riksfardini et al., 2023).

Namun, meskipun sistem ini sudah diterapkan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Seperti dikutip dalam Riset Pengabdian tahun 2024 yang menyatakan bahwa tidak semua pelaku UMKM langsung merasa nyaman dengan teknologi tersebut. Sebagian dari mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami cara kerjanya, terutama bagi yang belum terbiasa memakai *smartphone*. Selain itu, adanya kendala

teknis seperti gangguan pada sistem atau ketidakjelasan dalam petunjuk pelaporan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Di KPP Pratama Bukittinggi, meskipun pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak pelaku UMKM, masih terdapat banyak wajib pajak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016) tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM terhadap PP Nomor 46 tahun 2013 di Kawasan Aur Kuning Kota Bukittinggi menyimpulkan bahwa sebesar 46,51 % wajib pajak UMKM diklasifikasikan tidak paham dan sebesar 47,53 % wajib pajak UMKM diklasifikasikan tidak patuh. Dan menurut data dari KPP Pratama Bukittinggi, total pelaku UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang ada di kota tersebut. Selain itu, tingkat keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di KPP Pratama Bukittinggi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto et al. (2020) mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM menunjukkan hasil bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anggiani & Susilawati (2024) juga menghasilkan temuan yang serupa mengenai kepatuhan pajak UMKM, yang menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak terhadap tarif pajak dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida & Irawati (2023) mengenai kepatuhan pajak pada UMKM yang dimediasi oleh kualitas pelayanan mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh Ristanti et al. (2022) mengenai kepatuhan wajib pajak mengungkapkan bahwa sanksi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Penelitian yang telah dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022) mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Studi yang dilakukan oleh Maili (2022) mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, yang menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan studi dari Yunia et al. (2021) tentang kepatuhan wajib pajak dengan preverensi risiko sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam studi yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021) tentang kepatuhan wajib pajak dengan preverensi risiko sebagai variabel moderasi, ditemukan bahwa mutu kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspanita et al. (2020) tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang menunjukkan hasil bahwa mutu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022) tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa persepsi tarif pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan tidak selalu memiliki dampak yang signifikan dalam menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan konteks ini dan adanya hasil penelitian yang bervariasi, peneliti ingin melakukan kajian ulang terhadap pengaruh variabel-variabel tersebut untuk melihat apakah terdapat konsistensi dalam efeknya kepada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan memusatkan perhatian utama pada Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut karena sebagian besar sektor usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, yang mempunyai peluang yang besar untuk memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Dengan demikian, peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM (Studi pada Pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Bukittinggi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi?

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi.
2. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi.
3. Untuk menguji secara empiris apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pembaca dan berbagai pihak yang menggunakannya. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademik

Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang perpajakan, terkhususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Hasil dari penelitian ini

juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang mendukung terhadap teori-teori yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, seperti teori kepatuhan fiskal dan teori perilaku pajak. Oleh karena itu, studi ini berpotensi untuk memperkuat atau menawarkan sudut pandang yang baru mengenai hubungan antara persepsi tarif pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan usulan yang berguna bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga yang terkait dalam merancang kebijakan yang lebih optimal dan efisien guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Studi ini juga berpotensi memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan dalam memperdalam pemahaman mengenai signifikansi persepsi tarif pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat memperbesar pendapatan negara dari sektor perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam studi ini terbagi menjadi lima bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai konteks permasalahan, pemetaan isu, pembatasan ruang lingkup, formulasi permasalahan, sasaran penelitian, kontribusi penelitian, serta struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan berbagai teori yang relevan dengan kajian-kajian sebelumnya yang akan dijadikan sebagai landasan teori, dasar dalam perumusan hipotesis, serta sebagai struktur dalam penyusunan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai kategori penelitian, lokasi serta durasi penelitian, populasi dan sampel yang diteliti, variabel yang dikaji, metode pengumpulan data, keabsahan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) instrumen, serta prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari eksperimen penelitian yang telah dilaksanakan, yang bertujuan untuk memberikan jawaban permasalahan yang sudah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman dari temuan penelitian, batasan-batasan yang ada dalam penelitian, serta rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.